

SKRIPSI
KONSEKUENSI YURIDIS BELT AND ROAD INITIATIVE CHINA
TERHADAP PERDAGANGAN DI ASIA SELATAN (STUDI KASUS
SRI LANKA TERHADAP PROYEK PELABUHAN HAMBANTOTA)

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

HIDAYAH MULYANI

BP : 1510111126

Pembimbing 1 : Prof. H. Firman Hasan, SH., LL.M.

Pembimbing II : Dr. Jean Elvardi, SH., MH.

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

	No. Alumni Universitas:	HIDAYAH MULYANI	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl Lahir : Cupak, 13 Desember 1997	(f) Tanggal Lulus : 20 April 2020	(g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
(b) Nama Orang Tua : Ali Jamal Elvi Sukaisih	(h) IPK : 3,59 (tiga koma lima sembilan)	(i) Lama Studi : 4 Tahun 10 Bulan	(j) Alamat : Koto Ranah Kecamatan IV Nagari Bayang utara
(c) Fakultas : Hukum			
(d) PK: Hukum Internasional (VI)			
(e) No. BP : 151011126			

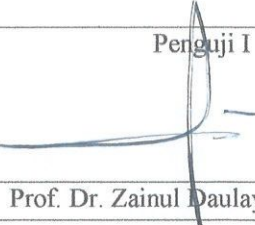
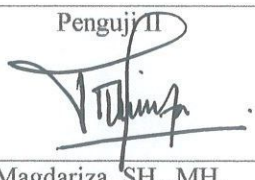
KONSEKUENSI YURIDIS BELT AND ROAD INITIATIVE CHINA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ASIA SELATAN (STUDI KASUS SRI LANKA TERHADAP PROYEK PELABUHAN HAMBANTOTA)
(Hidayah Mulyani, 151011126, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional), 70 halaman, 2020)

ABSTRAK

Belt and Road Initiative merupakan suatu strategi kebijakan yang digagas oleh pemimpin tertinggi China yaitu Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 yang berfokus pada untuk meningkatkan konektivitas kerjasama antar negara negara di kawasan Eurasia. Namun, proyek BRI yang di gagas oleh China menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai suatu proyek kerjasama infrastruktur atau sebagai strategi China dalam upayanya meningkatkan perannya di dunia. Spekulasi tersebut diperkuat setelah perjanjian akuisisi Hambantota ke tangan Pemerintah China tahun 2017 lalu seakan akan memberi kesan sebagai suatu jebakan hutang China melalui proyek proyek infrastruktur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsekuensi yuridis kebijakan Belt and Road Initiative China terhadap perdagangan di Asia Selatan, (2) Bagaimana status hukum Belt and Road Initiative China dalam Proyek pelabuhan Hambantota, (3) Apakah Investasi China melalui Belt and Road Initiative tersebut dapat berakibat hilangnya kebebasan Sri Lanka terhadap proyek Pelabuhan Hambantota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara **meneliti** bahan pustaka yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup inventarisasi hukum positif, asas asas hukum, sistematika peraturan perundang undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dari akuisisi pelabuhan Hambantota ke Pemerintah China yaitu terjadinya pelemahan kedaulatan atas negara Sri Lanka akibat perjanjian akuisisi Pelabuhan Hambantota antara Sri Lanka dan Pemerintah China hingga harus berakhir 99 tahun pada prasarana dalam upaya mendukung pemerintah yang berkuasa, menekan pemerintah untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh pemerintah China sebagai pembangunan infrastruktur di Sri Lanka.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 April 2020
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

TandaTangan	Penguji I	Penguji II
		
NamaTerang	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH	Magdariza, SH., MH.


Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : Dr. Jean Elvardi, SH., MH.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	University Alumni Number :	HIDAYAH Mulyani	Faculty Alumni Number:
	(a) Place/Date of Birth : Koto Ranah, 13 Desember 1997	(f) Graduated Date : 20 April 2020	(g) Graduated Predicate : Very Satisfactory
(b) Parents Name : Ali Jamal Elvi Sukaisih	(h) IPK : 3,59	(i) Duration Of Study : 4 Year 10 Month	(j) Address : Koto Ranah sub District IV Nagari Bayang utara . Pesisir Selatan
(c) Faculty : Hukum			
(d) Specificity Program : International law (VI)			
(e) Student Number : 1510111126			

CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE JURIDICIONS CONSEQUENCES OF INTERNATIONAL TRADE IN SOUTH ASIA (CASE STUDI OF SRI LANKA ON HAMBATOTA'S PORT

(Hidayah Mulyani, 1510111126, Faculty of Law, 2020, 71 pages)

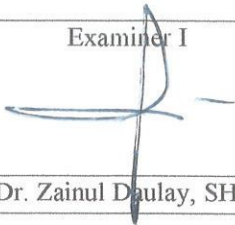
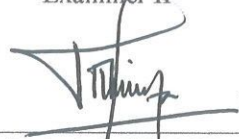
ABSTRACT

Belt and Road Initiative is a policy strategy initiated by China's leader, President Xi Jinping in 2013, it is to focus on improving cooperation connectivity between countries in the Eurasian region. However, the BRI project in the world of China raises several questions as a project of infrastructure cooperation or as a Chinese strategy in improving its role in the world. The speculation was strengthened after Hambantota's acquisition agreement to the government of China in 2017 then seemed to give the impression as a Chinese debt trap through infrastructure projects. The problem formulation in this study are; (1) how is the juridical consequence of China's Belt and Road Initiative policy on trade in South Asia. (2) how is China's Belt and Road Initiative legal status in the Hambantota's port project. (3) whether China's investments through the Belt and Road Initiative could result in the loss of Sri Lankan freedom to the Hambantota port project. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is a legal study conducted by examining the library material consisting of primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. Normative legal research includes the inventory of positive laws, basic legal principles, systematics of legislative legislation, legal history and legal comparisons. The result of the research concluded that the goal of the Chinese government was to weaken the sovereignty of Sri Lanka in Eurasian region as result of acquisition of Hambantota port by Chinese government for 99 years on leasehold ownership from the effort of supporting the Sri Lanka's ruling government into power via providing financial aid, pressuring the government for repayment of loan provided by Chinese government for infrastructure development of Sri Lanka.

Defended in front of examining team and declared passed on April 20,2020

The abstract has been approved by the examiner

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Name	Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH	Magdariza, SH., MH.

Knowing,

Head of International Law : **Dr. Jean Elvardi, SH., MH**


Signature

Alumnus have applied to the Faculty/ University and received an alumnus number

	Staf of Faculty/University	
Faculty Alumni Number	Name:	Signature:
University Alumni Number	Name:	Signature: